ASAS-ASAS UMUM PERADILAN YANG BAIK MENURUT KONSEPSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nama: M. ALBERTRAND JUSENDO ARFAN

Email: albertrandarfian18@gmail.com

No BP: 2010003600059

UNIVERSITAS EKASAKTI PADANG

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Mencakup unsur-unsurnya yaitu perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak dan asas legalitas dalam arti formil maupun materiil serta diwarnai oleh aspirasi-aspirasi keindonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari Pancasila. Menurut Frederick Julius Stahl, ciri-ciri “Rechtstaat” atau “Rule of Law”, “droits de l’homme et du citoyen”, Machtenscheiding, Wetmatigheid van bestuur; administratief rechtspraak an beslissing van geschillen. Sedangkan menurut A.V Dicey yaitu; supremacy of law , equality before the law, the constitution based on the individual right.

Tugas Pemerintah yang bersifat multi-kompleks memiliki konsekuensi untuk melakukan “Freis Ermessen” , bertindak atas inisiatif sendiri, tindakan tata usaha negara itu sesuai dengan hukum berdasarkan Pancasila. Penerapan (AAUPB) menjelmakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam tata usaha

TNI, penulis ketahui belum pernah dilakukan secara sistematis dan komprehensif dalam bentuk disertasi. Beberapa ulasan pakar hukum dalam menyoroti masalah tersebut masih bersifat parsial serta belum secara komprehensif. Peran dan tugas serta tanggung jawab pejabat tata usaha TNI secara teoritis bersifat netral, pelaksanaannya sangat potensial disalahgunakan (*detournement de pouvoir*), (*abus de droit/willekeur*), (*onrechtmatige overheidsdaad*). H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt menyatakan; organ pemerintahan menjalankan tindakannya tidak hanya terikat pada peraturan perundang-undangan dan hukum tertulis, juga harus memperhatikan hukum tidak tertulis yaitu AAUPB dan untuk terciptanya perlindungan hukum bersifat formal materil.

Menurut Sjachran Basah, kehadiran AAUPB mutlak untuk dijadikan batu ujian dalam menilai suatu keputusan tata usaha negara yang disengketakan, sehingga prinsip good governance dapat diwujudkan. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membuka peluang untuk melakukan pengujian (*toetsingrecht*) terhadap suatu keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Implementasi Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 dan Implementasi peraturan perundang-undangan, yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai alasan untuk mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan karena beberapa ketentuan memiliki makna yang tidak sesuai lagi dengan hukum ketatanegaraan Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi (*legal system*); 1) komponen struktur lembaga tata usaha TNI, bagaimana cara bekerjanya dan kompetensinya; 2) komponen substansif

beschikking mencakup pengertian kaidah hukum tertulis kaidah hukum kebiasaan yang tidak tertulis, karakter khas ilmu hukum normatif.

Pergeseran konsepsi nachwachtersstaat (negara peronda) ke konsepsi welfare state membawa pergeseran pada peranan dan aktivitas pemerintah. Pada konsepsi nachwachtersstaat berlaku prinsip staatsonthouding, yaitu pembatasan negara dan pemerintah dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah bersifat pasif, hanya sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Sementara pada konsepsi welfare state, pemerintah diberi kewajiban untuk mewujudkan bestuurszorg (kesejahteraan umum), yang untuk itu kepada pemerintah diberikan kewenangan untuk campur tangan (staatsbemoienis) dalam segala lapangan kehidupan masyarakat. Artinya pemerintah dituntut untuk bertindak aktif ditengah dinamika kehidupan masyarakat.

Keberadaan konsep negara kesejahteraan dengan tujuannya untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, adalah dalam rangka untuk melengkapi asas legalitas yang mana semua Aktivitas pemerintahan harus mendasarkan kepada peraturan perundangan. Sementara itu, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sangat mungkin mempengaruhi pula terhadap dinamika perkembangan masyarakat dengan berbagai aktivitasnya, yang mana sangat mungkin terjadi untuk menangani masalah yang timbul, belum ada peraturannya.

Setiap bentuk campur tangan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan dari asas legalitas, yang menjadi sendi utama negara hukum. Sejak dianutnya konsepsi welfare state, yang

menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara dan untuk mewujudkan kesejahteraan ini pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, yang dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tanpa bersandar pada peraturan perundang-undangan, tetapi berdasar pada inisiatif sendiri. Namun, disatu sisi keaktifan pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan umum haruslah senantiasa berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (selanjutnya disebut AAUPB). Jimly berpendapat bahwa dalam paham negara hukum segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau „rules and procedures“ (regels).

Fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik. Dalam hubungan ini, Muin Fahmal mengemukakan bahwa asas umum pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya.

B. PEMBAHASAN

a. Implementasi AAUPB Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Pusat Dan Di Mabes TNI

1)Implementasi Pada Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden bersifat konkret-individual (beschikking) dan bersifat non contentiosa. Ciri-ciri konkret-individual antara lain bentuk tertulis, dikeluarkan oleh Presiden, dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, ditujukan kepada seseorang atau badan hukum perdata.

2)Implementasi Di Tingkat Komando Utama (Kotama/Mabes TNI)

Surat Keputusan Panglima TNI Bersifat konkret-individual (beschikking). Surat keputusan tersebut yang memimpin penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan TNI serta pengelolaan pertahanan negara. Asas desentralisasi Panglima TNI dalam penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan TNI serta pengelolaan pertahanan negara, di bidang personel, materiil, fasilitas dan jasa yang konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata. Pengecualian yang tidak termasuk ke dalam pengertian surat keputusan Panglima TNI adalah perbuatan hukum perdata, bidang operasi militer, bidang keuangan dan perbendaharaan, hasil pemeriksaan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hukum acara pidana, hukum pidana,

hukum pidana militer dan hukum disiplin prajurit, bersifat umum, masih memerlukan persetujuan.

b. Implementasi Dan Berlakunya AAUPB Sebagai Kaidah Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan

Implementasi AAUPB dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam tata usaha TNI, merupakan penerapan suatu norma hukum yang lebih rendah yang ditentukan oleh norma hukum yang lebih tinggi tersebut. Menurut Struycken dan van Wijck merupakan sikap mundur pembuat undang-undang (terugtrede), karena diskresioner, dapat dilakukan dalam keadaan khusus, sehingga lebih sesuai dengan harapan pembuat undang-undang. Teori beslissingenleer dari Ter Haar; cara terjadinya kebiasaan mendapatkan sifat hukumnya ditentukan melalui proses, proses dan cara berlakunya kebiasaan ditentukan oleh existential momentnya, dituangkan ke dalam suatu ketetapan/keputusan oleh para fungsionaris hukum. Bushar Muhammad, Extential penerapan AAUPB adalah pada saat pejabat tata usaha TNI menuangkannya ke dalam suatu keputusan, yang dikeluarkannya. Dalam hal peraturan tidak tertulis, disebut “peraturan kebiasaan”. Menurut Van der Vlies dibagi 2 (dua) yaitu Asas formal meliputi asas tujuan yang jelas, asas organ/lembaga yang tepat, asas perlu pengaturan, asas dapat dilaksanakan, asas konsensus. Asas Materiil meliputi sistematika yang jelas, asas dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas

pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual. Van der Vlies, mempengaruhi rumusan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

AAUPB diterapkan oleh Panglima TNI melalui Surat Keputusan yang bersifat kongkret, individual dan final. Final tidak didasarkan pada kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya, namun tetap menurut cara yang ditetapkan. Peranan AAUPB mengisi ketidaklengkapan, ketidakjelasan dan kekosongan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dalam tata usaha TNI. Peranan AAUPB mengisi ketidaklengkapan dan ketidakjelasan serta kekosongan dengan cara mengeluarkan (*beschikking*) dengan memperhatikan asas-asas berikut asas perbuatan baik, asas penelitian yang cermat, asas prosedur keputusan yang cermat, asas keputusan yang sah, asas motivasi, asas persamaan, asas kepercayaan. Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).

a) Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (good governance)

Di Belanda dimaknakan sebagai asas keabsahan, AAUPB dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan ciri dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Menurut UNDP karakteristik good governance meliputi : Participation, Rule of Law, Transparency, Responsiveness, melayani setiap stakeholders, Consensus Orientation, Equity, Effectiveness and Efficiency, Accountability, Strategic Vision. Berdasarkan hasil penelitian 9 prinsip paling dominan asas kepentingan umum, pilihan kedua yaitu partisipasi

masyarakat/anggota TNI sedang asas akuntabilitas, transparansi dan desentralisasi pilihan ketiga dan keempat serta asas desentralisasi, kemitraan, efektif dan efisien, wawasan ke depan, profesionalitas dan demokrasi masing-masing berada urutan berikutnya dari 9 prinsip-prinsip good governance yang dominan. Penerapan good governance dan clean government dapat membantu upaya-upaya dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi maupun nepotisme.

b) Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dengan AAUPB. Mengukur menggunakan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis termasuk AAUPB disebut asas keabsahan atau asas menurut hukum. Putusan pengadilan sewenang-wenang prosedur, asas kecermatan, asas penyalahgunaan wewenang, asas kepastian hukum, asas kejujuran atau keterbukaan atau fair play.

1) Pemberlakuan AAUPB Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Tata Usaha TNI

a) Pada tingkat Pusat

Implementasi dan berlakunya AAUPB di Pusat Sejak Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2010. Implementasi AAUPB melalui Surat Keputusan Presiden Bersifat Konkret-Individual (beschikking) norma hukum yang lebih rendah ditentukan oleh norma hukum yang lebih tinggi, tindakan menerapkan hukum dilakukan oleh Presiden selaku fungsionaris hukum. Teori beslissingenleer dari Ter Haar analisis yuridis meliputi Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2004, sebagaimana dikemukakan oleh Van der Vlies, dengan menggunakan kriteria asas-asas yang bersifat formal dan asas-asas yang bersifat materil. Hasil penelusuran dan penelitian (beschikking).

Secara formal pemberlakuannya berdasarkan pada: 1) Asas Persiapan Yang Cermat; 33/TNI/2005 tanggal 4 Agustus 2005 tentang menaikkan pangkat Pati Sonson Basar, S.H., setelah menerima usulan dari Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor R/39-08/16/01/Spres tanggal 20 Januari 2005. Afdeling 3.2 Zorgvuldigheid en belangenaf weging (Bagian 3.2 Kecermatan dan pertimbangan kepentingan);

2) Asas Motivasi; Menganalisis Nomor 15/TNI/2007 tanggal 9 Mei Tahun 2007 pemberhentian dengan hormat Marsekal Pertama TNI F. Budi Hartanto, S.IP. Landasan yuridis Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Dikaitkan dengan pendapat P. de Haan dan Ateng Syafrudin, asas motivasi didasarkan pada fakta yang teguh, sebagai hukum tidak tertulis sudah tidak dapat dibantah. Perbandingan asas motivasi secara normatif Afdeling 4.1.4 Motivering. Artikel 4.16 (4.1.4.2) (Pasal 4 : 16 (4.1.4.2) motivasi telah dikodifikasi dalam Awb;

3) Asas Larangan Penyalahgunaan Prosedur; Bersifat formal-prosedural. (procedure justice), substantial.

Secara materiil pemberlakuan AAUPB: 1) Asas Kepastian Hukum; Hukum harus benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya. Setiap keputusan Presiden yang dikeluarkan tidak akan dicabut kembali. Nomor 10/TNI/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang menaikkan satu tingkat lebih tinggi para pati TNI Mayor Jenderal TNI Hadi Waluyo, S.IP, M.Sc. menjadi Letnan Jenderal TNI terhitung mulai 20 Maret 2003. Sejak tanggal 7 Februari 2005 tumbuh kesadaran hukum baru di lingkungan Sekretariat Militer tidak lagi mencantumkan vliegheid clause; 2) Asas Kepercayaan atau Pengharapan; Implementasi tidak akan dicabut kembali dengan alasan terdapat kekeliruan di dalamnya, kenyataannya jarang sekali dicabut kembali. Pasal 265 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 Implementasi 9/TNI/2003 tanggal 14 Maret 2003 tentang Pemberhentian dengan hormat dari dinas Keprajuritan Tentara Nasional Indonesia atas nama Nur Suradji Irfani, Kolonel Inf NRP. 27234 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2003; 2) Pemberlakuan AAUPB di Pusat Sejak Tahun 2001 Sampai Dengan Tahun 2010. Beschikking, sejak 15 Oktober 2001 sampai dengan 25 Agustus 2010. W. Zevenbergen berlakunya secara yuridis, apabila kaidah hukum penerapan sesuai dengan cara-cara ditetapkan. Pendapat Hans Kelsen berlakunya suatu kaidah hukum secara yuridis, apabila penerapan sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya. Keharusan AAUPB dalam penerapan dan pemberlakuannya menjadi kebiasaan dan bahkan menjadi hukum tidak tertulis tumbuh dan hidup pada peradilan tata usaha militer, bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik bersifat formal-prosedural maupun bersifat material-substansial. Menurut teori historis-sosiologis dari Gustav Radbruch, penerapannya AAUPB merupakan hal yang nyata hidup dan berkembang di dalam praktek menjadi “kebiasaan” atau menjadi hukum tidak tertulis.

b) Di tingkat Mabes TNI

Implementasi AAUPB di Mabes TNI Sejak Tahun 2001 Sampai Dengan Tahun 2010. Dapat dilihat dengan berlakunya Surat Keputusan Panglima TNI Bersifat konkret individual, Keputusan Nomor Skep/683/XI/2001 tanggal 15 November 2001 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia atas nama Mayor Chk Hidayat Manao, SH. Penerapan AAUPB melalui surat keputusan Panglima TNI yang materinya bersifat peraturan (regeling), Surat Keputusan Panglima TNI Nomor ; Skep/ 628/X/2001 tanggal 26 Oktober 2001 tentang Pengesahan naskah sementara standardisasi peralatan komunikasi dan elektronika (alkomplek) TNI. Penerapan suatu norma hukum yang lebih rendah ditentukan oleh norma hukum yang lebih tinggi konkret individual dan peraturan. Teori *beslissingenleer* dari Ter Haar.

Secara formal AAUPB pada tata usaha TNI sebagai berikut:

1) Asas Persiapan Yang Cermat; Surat Keputusan Panglima TNI; Kep/763/XI/2009 tanggal 30 November 2009, pengangkatan Drs. Burhan

Dahlan, S.H. M.H., jabatan baru Kadilmiltama di bawah Mahkamah Agung RI. Setelah Panglima TNI menerima dan membaca Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun MARI Nomor 141/XI/2009 tanggal 14 Nopember 2009, landasan yuridis Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI Nomor KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Nomor Skep/420/IX/ 2004 tanggal 1 September 2004 tentang kerjasama dalam pembinaan personel militer yang bertugas pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 165/KMA/SK/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 mengatur dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penyempahan serta pelantikan. Penerapan surat peraturan Panglima TNI (regeling), cermat, Perpang/24/X/2007 tanggal 2007 tentang Petunjuk administrasi pembinaan penugasan prajurit dalam jabatan di luar struktur TNI.

2) Asas Motivasi; memuat alasan jelas, benar dan terang serta objektif, tepat dan dapat dimengerti serta konsisten. Selanjutnya harus memiliki dasar yuridis yang benar sebagaimana ditegaskan oleh P. de Haan dan Ateng Syafrudin.

3) Asas Larangan Penyalahgunaan Prosedur; Tidak boleh menyimpang dari ketentuan prosedur baik ketentuan tertulis maupun tidak tertulis, bersifat formal-prosedural.

AAUPB Bersifat Material berupa:

1) Asas Kepastian Hukum; Tidak akan dicabut kembali meskipun di dalamnya ditemukan adanya kesalahan dan kesalahan terjadi karena kelalaian atau kecerobohan;

2) Asas Kepercayaan; Tidak ditemukan adanya pernah dicabut kembali, dimasukkan sebagai salah satu dari AAUPB;

3) Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang; Wewenang harus digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan semula. Pasal 265 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1997. Peraturan Panglima TNI No. Perpang/4/IV/2007 tanggal 18 April 2007 tentang Penunjukan Perwira Penyerah Perkara di lingkungan TNI; 4) Asas Persamaan; Mengambil keputusan yang sama dalam menghadapi fakta yang sama. P. Nicolai selain terikat kepada peraturan perundang-undangan terikat AAUPB sebagai hukum tidak tertulis.

Pemberlakuan AAUPB di Mabes TNI Sejak Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2010. Penerapan AAUPB sesuai dengan “kebiasaan” hidup dan berkembang dalam praktek W. Zevenbergen menyatakan suatu kaidah hukum “berlaku” secara yuridis apabila penerapan kaidah hukum sesuai dengan cara-cara yang ditetapkan. Menurut Hans Kelsen “berlakunya” suatu kaidah hukum secara yuridis penerapan sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi. Peranan AAUPB Mengisi Ketidaklengkapan, Ketidakjelasan dan

Kekosongan Peraturan Perundang-Undangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik di Pusat dan di Mabes TNI. Secara yuridis penerapan dan pemberlakuan serta peranan AAUPB sejalan dengan Penjelasan UUD 1945 menempatkan kedudukan AAUPB sebagai hukum tidak tertulis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hukum konstitusi (the law of the constitution), memiliki derajat yang sama dengan hukum tidak tertulis dan memiliki kekuatan mengikat yang dapat dipaksakan apabila terjadi pelanggaran terhadapnya. Sedangkan peranan AAUPB mengisi (wetsvacuum), pada bagian formal sejalan dengan pendapat C.P.J. Goorden, peranan AAUPB telah diterima secara umum di Belanda. Berperannya AAUPB secara normatif sebagai pemerintahan menurut hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Hambatan dan Solusi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik: Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dalam Tata Usaha TNI. Mengukur hukum tertulis dan hukum tidak tertulis termasuk AAUPB disebut asas “keabsahan” atau asas menurut hukum. Governance berfungsi secara efektif dalam upaya mencapai tujuan telah ditetapkan sesuai dengan 5 (indikator) yaitu hak asasi manusia, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, melaksanakan hukum untuk melindungi masyarakat, bertanggung jawab kepada masyarakat dan orientasi pemerintah menuju pembangunan. Prinsip-prinsip good governance yang paling populer di kalangan pemerintah pusat, Mabes TNI, terhadap 9 prinsip-prinsip good governance asas

kepentingan umum partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi dan desentralisasi, efektif dan efisien, profesionalitas.

a) Masih mendasarkan teori *beslissingenleer beschikking*. Pejabat struktural kurang memahami bagaimana landasan keberlakuan perundang-undangan dan menerapkan AAUPB, karena harus memperhatikan asas formil dan material. Dan Pasal 265 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997, tetapi termasuk kaidah kaidah hukum tidak tertulis. Acuan melalui Juklak Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 052/Td.TUN/III/1992 tidak dimasukkan dalam diktum putusan melainkan cukup dalam pertimbangan dan Pasal 5 UU No. 10 tahun 2004 belum terkodifikasi;

b) Kurang memahami peranan dalam menerapkan AAUPB;

c) Penyelenggaraan pemerintahan yang baik meliputi *Transparency, Accountability, Participation, Effectiveness and Efficiency*; Implikasinya kurang efektif Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

Implementasi AAUPB masih perlu mendasari teori *beslissingenleer* dari Ter Haar. Perlu peningkatan pemahaman prosedur penerapan AAUPB dan harus mendasari Pasal 265 Ayat 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Juklak Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 052/Td.TUN/III/1992, Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 juncto Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

C. PENUTUP

Implementasi dan pemberlakuan AAUPB menjelmakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam Tata Usaha TNI di Pusat dan di Mabes TNI. AAUPB berdasarkan Pasal 265 Ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 alasan membatalkan keputusan Tata Usaha TNI meliputi perbuatan bertentangan ketentuan perundang-undangan, menyalahgunakan wewenang (*detournement depouvoir*) sewenang-wenang (*willekeur*) kurang memadai Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 juncto Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tanggal 12 Agustus 2011.

Berlakunya AAUPB secara yuridis didasarkan pada kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya, secara sosiologis mencerminkan tuntutan kebutuhan yang sesuai dengan realita kesadaran hukum prajurit TNI khususnya dan masyarakat pada umumnya. Secara filosofi, cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berperannya AAUPB dapat melengkapi kekurangan dan ketidakjelasan mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan (*wets vacuum*), sebagai hasil penemuan hukum, sifat dinamis AAUPB sebagai hukum tidak tertulis, dapat berubah dengan cepat mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Implementasi AAUPB memahami karakteristik, prinsip-prinsip *good governance* yang paling populer di kalangan pemerintah pusat, Mabes TNI, 9 prinsip-prinsip *good governance* dominan asas kepentingan umum dan partisipasi masyarakat, asas akuntabilitas, transparansi dan desentralisasi, asas desentralisasi, kemitraan, efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 201. <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- Laurensius Arliman S, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, Padjadjaran Journal of Law, Volume 4, Nomor 3, 2017. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>.
- Laurensius Arliman S, Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Supremasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2018. <http://dx.doi.org/10.36441/hukum.v1i01.102>.
- Laurensius Arliman S, Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Menangkal Intoleransi Umat Beragama Di Indonesia, Ensiklopedia of Journal, Volume 1, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.18>.
- Laurensius Arliman S, Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, Kertha Patrika, Volume 39, Nomor 3, 2017, <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03>.
- Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Arena Hukum, Volume 12, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5>.
- Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, Dialogica Jurnalica, Volume 11, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.
- Laurensius Arliman S, Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga

Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2018, [https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2\(02\).1587](https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2(02).1587)

Laurensius Arliman S, Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia, Doctrinal, Volume 1, Nomor 2, 2016.

Laurensius Arliman S, Ni Putu Eka Dewi, *Protection of Children and Women's Rights in Indonesia through International Regulation Ratification*, Journal of Innovation, Creativity and Change Volume 15, Nomor 6, 2021.

Laurensius Arliman S, *Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme*, Jurnal Yuridis, Volume 3, Nomor 2, 2016, <http://dx.doi.org/10.35586/v3i2.180>.

Laurensius Arliman S, Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, Jurnal Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020..